

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

Chandra Trisatio
NPP. 29.0013

Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: cn.trisatio97@gmail.com

ABSTRACT

Problems statement (GAP) One of the efforts of the West Aceh Regency government in dealing with flood disasters that occur every year is to coordinate with BPBD in order to minimize the occurrence of flood disasters. The **purpose** of this study is to find out the role, constraints and efforts of BPBD in disaster management at the pre-disaster flood stage in West Aceh Regency, Aceh Province. The **Metode** used in helping this research work is a descriptive type of research method with a qualitative approach, in examining the role of BPBD can be reduced based on 5 dimensions, namely the role of the government as a stabilizer, the role of the government as an innovator, the role of the government as a moderniser, the role of the government as a pioneer, the role of the government as its own executor. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The data obtained is then analyzed and presented with the stages of processing data and preparing data with analysis, until finally a conclusion can be drawn. **Results research** shows that the role of BPBD in carrying out its role in disaster management in the pre-flood disaster stage is three, namely by conducting socialization related to making disaster-prone maps, assisting in terms of relief and rescue during disasters, and as a stage of recovery and rehabilitation of reconstruction in the aftermath of disasters. While there are 3 inhibiting factors of the role, namely the lack of human resources, funding constraints, and still lack of public awareness of the dangers of disasters. **Conclusion** for BPBD's efforts in overcoming these obstacles, namely BPBD must always be ready to be prepared in disaster problems and must always be guided by standard operating procedures (SOPs) that have been applied so that the process of grinding can be achieved in accordance with the expected results, besides that public awareness is also important to help the role of BPBD in tackling disasters at the stage. pre-disaster flooded.

Keywords: Role, countermeasures, flood

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan bencana banjir yang menjadi bencana tahunan yang belum terjadi penurunan jumlah kasusnya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD agar dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui peran, kendala serta upaya BPBD dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. **Metode** yang digunakan ialah metode penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam mengkaji peranan BPBD dapat diturun berdasarkan 5 dimensi yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, peran pemerintah sebagai inovator, peran pemerintah sebagai modernisator, peran pemerintah sebagai pelopor, peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan disajikan dengan tahapan mengolah data dan menyiapkan data dengan analisis, hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa peran BPBD dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana banjir ada tiga yakni dengan mengadakan sosialisasi terkait pembuatan peta rawan bencana, membantu dalam hal pertolongan dan penyelamatan pada saat bencana, dan sebagai tahap pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi pada pasca bencana. Sedangkan ada 3 faktor penghambat dari peranan tersebut yaitu masih kurangnya SDM, kendala dana, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana. **Kesimpulan** dari upaya BPBD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu BPBD harus selalu siap siaga dalam masalah bencana dan harus selalu berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterapkan agar proses pengatasan yang dilakukan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang telah diharapkan, disamping itu kesadaran masyarakat juga penting guna membantu peran BPBD dalam menanggulangi bencana pada tahap pra bencana banjir ini.

Kata kunci : Peran, Penanggulangan, banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan bencana yang memiliki fungsi untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahaya bencana alam tentu sangat dibutuhkan agar perlindungan yang diberikan oleh negara dapat benar-benar optimal, maka dari itu dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah. Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh merupakan daerah yang tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya bencana. Dalam hal ini adapun pihak berwajib yang melakukan penanggulangan terhadap bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD Kabupaten Aceh Barat dibentuk pada tahun 2010. Dan diperkuat dengan lahirnya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya dengan dibentuk BPBD di Kabupaten Aceh Barat, masyarakat Aceh Barat dapat perlindungan dan pelayanan dari negara apabila terjadi bencana alam. BPBD Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan mitigasi bencana alam yang sistematis, terkoordinir, dan terpadu. BPBD juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu proses administrasi guna menjalankan fungsinya. Demi terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal dalam hal penanggulangan bencana alam, maka BPBD harus memiliki administrasi dan sistem pengarsipan yang baik, dan juga mekanisme pelaporan dan pengaduan yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Bencana perlu dilakukan penanggulangan secara tepat dan cepat agar korban dan kerusakan akibat bencana menjadi sedikit dan supaya hal tersebut dapat terjadi maka dibutuhkan instansi BPBD yang cepat tanggap dan responsif dalam hal menanggulangi bencana yang terjadil di Kabupaten Aceh Barat. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD setidaknya harus mencakup siklus penanggulangan bencana yang meliputi empat macam situasi, yakni situasi ketika tidak terjadi bencana, situasi ketika terdapat potensi bencana, situasi pada saat terjadi bencana, dan situasi ketika setelah terjadi bencana. Hal yang harus dilakukan juga harus meliputi empat tahap yakni pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan manajemen terkait penanggulangan bencana banjir. Dalam konsep umum manajemen Kebencanaan,peneliti melihat ada empat tahapan yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian ini, yakni tahap pra bencana, potensi bencana, tanggap darurat bencana, dan tahap pasca bencana. Peneliti akan mendalami cara BPBD melaksanakan pada tahap pra bencana tersebut yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Dari hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan narasumber selaku pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat dibidang pencegahan dan mitigasi didapatkan hasil bahwa kasus bencana banjir terus terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Mulai dari tahun 2019 yang menunjukkan 5 kasus, pada 2020 terjadi 5 kasus, serta hingga pertengahan tahun ini sudah terjadi 4 kasus. Beliau juga menyatakan bahwa bencana alam banjir ini merupakan agenda tahunan bagi BPBD untuk melakukan penanggulangan terhadap banjir di kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini juga akan berfokus dan berusaha mendalami terkait bagaimana standar

operasional prosedur dan juga tata cara penanggulangan pra bencana banjir dengan tujuan melihat kesiapan BPBD dalam menangani bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pihak yang memiliki kewajiban untuk penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bencana banjir adalah bencana tahunan yang setiap tahun muncul di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Masih tingginya kasus bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat sehingga dibutuhkan peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir dan masih kurangnya koordinasi BPBD dengan Pemerintah Daerah maupun penganggulangan banjir. Melihat masalah tersebut, ,ala [emeliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan manajemen terkait penanggulangan bencana banjir pada tahap pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun konteks upaya pemerintah dalam deteksi dini. Penelitian Miftahul Ridho yang memiliki judul Analisis Kesiapsiagaan BPBD Kab. Aceh Barat dalam Pengendalian Dampak Bencana Banjir di Masyarakat Kec. Kaway XVI (Miftahul Ridho, 2016), menemukan bahwa BPBD Kab. Aceh Barat masih terkendala di internal yaitu kurangnya dana, sarana, dan prasarana serta eksternal. Penelitian Sugipto Beong, Erwin Resmawan, dan Rita Kaling berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau faktor-faktor penghambat dari kinerja BPBD di Kota Samarinda (Beong, dkk, 2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda, untuk penyebaran informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas jalan Kota Samarinda. Penelitian yang dilakukan oleh Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, dan Roni Pindahanto yang berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Kasus BPBD Kota Batu) (Aurellia, dkk, 2019) menemukan bahwa Perlu peningkatan kesadaran akan potensi bencana dan dampak bencana dengan mendukung BPBD dalam pembentukan desa tangguh bencana yang diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Riska yang memiliki judul Peran BPBD dalam Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut

Taman Sari Jawa Barat (Dea Riska, 2020). Hasil penelitiannya adalah pada penanggulangan pasca bencana kebakaran di Krukut BPBD berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bekerjasama dengan lembaga terkait. Penelitian yang dilaksanakan oleh Henrika Riantika berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Henrika Riantika, 2021). Hasil penelitiannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebaiknya membuat mekanisme tanggap darurat untuk mencakup prosedur mengenai darurat, lokasi, dan intruksi untuk fasilitas darurat dan prosedur evakuasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam menangani bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan difokuskan pada peran BPBD pada tahap pra bencana banjir dan tugas dari BPBD sendiri yaitu pada tahap analisis kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang bencana alam secara umum dan tahap bencana alam secara menyeluruh. Perbedaan lainnya yaitu dari segi objek penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek penelitian adalah BPBD Kabupaten Aceh Barat sementara penelitian dahulu mengambil objek BPBD daerah lainnya di Indonesia.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran, kendala, dan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dalam menanggulangi bencana banjir.

II. METODE

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan Maret 2022. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempertimbangkan keadaan obyek ilmiah, dimana sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis daya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya yaitu kualitatif ke arah generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara kepada 11 orang informan. Setelah data dikumpulkan kemudian data dianalisis menggunakan metode Creswell yang terdiri dari pengelolaan dan persiapan data, membaca semua data, analisis lebih detail dengan pengkodean data, penerapan coding, tampilan deskripsi dan tema, serta menafsirkan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana banjir dapat dianalisis menggunakan teori dimensi peran

siagian, yaitu: sebagai stabilitor, sebagai inovator, sebagai modernisator, sebagai pelopor, dan sebagai pelaksana sendiri. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran BPBD dalam Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana

1. Peran sebagai Stabilisator

Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat sebagai Stabilisator adalah selalu menjaga masyarakat di Aceh Barat agar dalam keadaan aman sehingga keseharian masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang telah pemerintah rancang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Peran sebagai Inovator

Peran BPBD Aceh Barat sebagai inovator ialah merupakan organisasi pemerintah yang menciptakan suatu hal yang baru menjadi sebuah kebijakan dan juga mekanisme baru untuk efektifitas dan efisiensi waktu, inovasi juga suatu solusi membangun dan memperbaiki yang sudah ada. Salah satu aspek novasi yaitu standar operasional prosedur hal tersebut harus selalu diperbaharui sesuai zaman teknologi baru agar kedepannya semakin maju dan membantu masyarakat terutama dalam penanggulangan bencana.

3. Peran sebagai Modernisator

Peran BPBD Kabupaten Aceh Barat selaku modernisator ialah bagian dari wujud pemerintah yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat, dimana pemerintah dan juga masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan perubahan teknologi dan perubahan kondisi sosiologi budaya masyarakat.

4. Peran sebagai Pelopor

Bencana banjir merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang tidak hanya dibebankan oleh BPBD tetapi juga menjalin kerjasama dengan instansi di daerah dalam mengatasi bencana banjir. Untuk menjalin kinerja dan koordinasi antar lembaga tersebut BPBD berperan sebagai koordinator serta fasilitator yang aktif menyukseskan program penanggulangan bencana banjir terkhusus pada tahap pra yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai pelopor dalam menanggulangi bencana pra banjir, BPBD menjalin kerjasama secara langsung dan tidak langsung bersama masyarakat untuk mencari solusi bencana banjir yang telah terjadi. BPBD harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana.

5. Peran sebagai Pelaksana Sendiri

Kegiatan penanggulangan banjir di pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kegiatan pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat merupakan tanggung jawab pemerintah. BPBD menjadi satu-satunya badan pemerintah yang menjadi pelaksana untuk penanggulangan banjir. Berbagai penyebab penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh BPBD yaitu keselamatan masyarakat, sarana prasarana yang terbatas, kompetensi yang belum memadai dari masyarakat dan tidak diminati oleh masyarakat ataupun sektor swasta. Sangat mungkin juga berbagai kegiatan yang dilakukan tidak bisa diserahkan kepada swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

3.2. Faktor Penghambat BPBD pada Tahap Kesiapsiagaan dan Mitigasi

Dalam upaya menjalankan peran BPBD pada tahap kesiapsiagaan dan mitigasi pra bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat mengalami beberapa hambatan, yaitu:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik

Kualitas pegawai di BPBD Aceh Barat baik PNS maupun THL belum mencapai jumlah yang baik, kemudian untuk pegawai tingkat kualifikasi keahliannya masih belum mencapai target. Hambatan tersebut sangat memengaruhi terjaminnya pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap Kesiapsiagaan dan Mitigasi. Karena pada tahap itu sangat penting dimana lebih baik mencegah dari pada mengobati.

2. Kendalan dana penyelenggaraan kegiatan operasional, sarana, dan prasarana belum mencukupi

Banyak penyelenggaraan kegiatan program dari BPBD pada tahap kesiapiagaan dan mitigasi bencana banjir yang tidak bisa berjalan dan tertunda. Penyebab utamanya karena kendala anggaran akibat covid-19 yang melanda negara kita Indonesia sehingga terjadi refocusing anggaran. Dana sangat penting untuk kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi karena pada tahap ini sangat dibutuhkan. Kemudian dari hasil observasi dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang dari segi kuantitasnya sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana

Dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat penting dalam menyukkseskan kegiatan pada tahap pra bencana Kesiapsiagaan dan Mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD Aceh Barat. Bencana memang tidak bisa kita hindari tetapi bisa kita minimalisir jika pemerintah dan juga masyarakat saling merangkul dalam penanggulangan bencana yang terjadi di daerah yang rawan bencana.

3.3. Upaya BPBD dalam Mengatasi Faktor Penghambat pada Tahap Kesiapsiagaan dan Mitigasi di Kabupaten Aceh Barat

Dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat, BPBD mengalami beberapa kendala. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk mengatasi kendala tersebut yaitu (1) BPBD selalu siap siaga dalam mengendalikan dampak banjir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada keuchik gampong diketahui bahwa BPBD selalu siap siaga dan telah menyiapkan banyak hal untuk menghadapi bencana banjir agar dampak yang ditimbulkan bencana banjir tidak terlalu besar. (2) BPBD selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterapkan agar proses pengatasan yang dilakukan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang telah diharapkan. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi pra bencana banjir bukan hanya dilakukan oleh BPBD. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk membantu peran BPBD dalam menanggulangi bencana pada tahap pra bencana banjir.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran BPBD dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana banjir terbagi menjadi 5 peran sesuai dengan teori Siagian, yaitu sebagai stabilitator, sebagai inovator, sebagai

modernisator, sebagai pelopor, dan sebagai pelaksana sendiri. Temuan utama peran BPBD sebagai stabilitator adalah BPBD bertanggungjawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai bencana agar masyarakat paham akan bahaya terjadinya bencana banjir. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir. Temuan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Tri Anngraini dan Dimas Agustian, 2021) yang menyatakan bahwa untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bencana dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai inovator peran BPBD adalah dalam melakukan inovasi pada standar operasional prosedur sehingga akan mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penganganann agar bencana dapat diminimalisir. Sebagai modernisator BPBD memiliki peran untuk selalu mengikuti perubahan teknologi yang tentunya sangat penting bagi keamanan dan keselamatan masyarakat jika terjadi benacana. Peran BPBD sebagai pelopor adalah berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh BPBD dengan lembaga lain dan bertindak sebagai koordinator serta fasilitator yang aktif menyukseskan program penanggulangan bencana banjir khususnya pada tahap pra bencana yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat. Peran BPBD sebagai pelaksana sendiri adalah BPBD menjadi penanggungjawab sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana hanya dilakukan oleh BPBD kareba sarana dan prasarana serta kompetensi untuk menangulangi bencana hanya dimiliki oleh BPBD. Ada beberapa faktor yang menghambat BPBD pada tahap kesiapsiagaan dan mitigasi, yaitu kurangnya SDA yang memiliki kualitas baik, penyelenggaraan operasional, sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana bahaya. Hal tersebut sesuai yang timukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sugipto Beong, Erwin Reswan, dan Rita Kalinggi yang menyakan bahwa faktor penghambat BPBD adalag kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Beong, dkk., 2018). Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat pada kesiapsiagaan dan mitigasi adalah dnegan selalu siap akan datangnya bencana, selalu berpedoman pada SOP yang telah dibuat, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Sri Heryati dalam penelitiannya yaitu perlu dibentuk program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana (Heryati, 2020).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa kurang sadarnya masyarakat terhadap bencana menjadi penghambat BPBD dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menganggulangi bencana karena ketika BPBD sudah siap menghadapi bencana tetapi masyarakat sendiri tidak siap padahal dampak bencana dapat diminimalisir jika pemerintah dan masyarakat bisa saling membantu. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana sehingga ketika terjadi bencana menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran BPBD dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana banjir adalah mengadakan sosialisasi terkait pembuatan peta rawan bencana, membantu dalam pertolongan dan penyelamatan pada saat bencana, dan membantu dalam

hal pertolongan dan penyelamatan pada saat bencana, dan sebagai tahap pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi pada pasca bencana. Sedangkan ada 3 faktor penghambat dari peranan tersebut yaitu masih kurangnya SDM, kendala dana, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana. Adapun upaya BPBD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu BPBD harus selalu siap siaga dalam masalah bencana dan harus selalu berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterapkan agar proses pengatasan yang dilakukan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang telah diharapkan, disamping itu kesadaran masyarakat juga penting guna membantu peran BPBD dalam menanggulangi bencana pada tahap pra bencana banjir ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir pada situasi lainnya yaitu situasi ketika terjadi bencana atau situasi ketika setelah terjadi bencana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan BPBD Kabupaten Aceh Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Creswell. 2013. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong., Lexi, J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Ramli, S. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Thoha. M., 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- LIPI-UNESCO/ISDR. 2006. *Pengembangan Framework Untuk Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Alam*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aurellia Chintia Deby H, Yaqub Cikusin, R. P. W., 2019. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)". *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 34–41.

Beong, S., Resmawan, E., Kalinggi, R., 2018. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda". *EJurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1–120.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana di Aceh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

D. Web

Beong, Sugipto, Erwin Resmawan, and Rita Kalinggi, 'PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA SAMARINDA', 6 (2018) <[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/JURNAL_SUGIP_\(10-01-18-02-20-29\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/JURNAL_SUGIP_(10-01-18-02-20-29).pdf)>

Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Dirjen_Rehabilitasi_Lahan, 'Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial Nomor: P.04/V-SET/2009 Tanggal: 05 Maret 2009 Tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai', 2009, 1–89 <https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/P_4_2009_RLPS_Lampiran-KRA.pdf>

LIPI-UNESCO/ISDR, *Pengembangan Framework Untuk Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Alam* (jakarta: Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006)

Mistra, *Antisipasi Rumah Di Daerah Rawan Banjir* (jakarta: Griya Kreasi, 2007)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

'Pengertian Informan Penelitian Dan Contohnya' <<https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>> [accessed 7 September 2021]

'PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM TAHAP KESIAPSIAGAAN (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)' <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3695>>

'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA'

'PERBAIKAN DARURAT PADA SAAT TRANSISI DARURAT BENCANA DI ACEH', 2016

'QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA', 2012

Ramli, S., *Pedoman Praktis Manajemen Bencana* (jakarta: dian rakyat, 2010)

Ridho, Miftahul, 'Analisis Kesiapsiagaan Bpbd Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengendalian Dampak Bencana Banjir Di Masyarakat Kecamatan Kaway Xvi', 2016 <<http://repository.utu.ac.id/283/1/I-V.pdf>>

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (bandung: CV. Alfabeta, 2018)

'Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Angket Dan Observasi) - Karyatulisku' <<https://karyatulisku.com/teknik-pengumpulan-data-wawancara/>> [accessed 9 September 2021]

Thoha. M., *Perilaku Organisasi* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

'UNDANG-UNDANG TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN'

'UU 24 Tahun 2007' <https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf> [accessed 14 September 2021]

